

# Pengawasan Sarana dan Prasarana Sekolah di Era Society 5.0

Wahdania Nur Rahma\*, Wildan Zulkarnain, Sunarni

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*wahdania.nur.2101316@students.um.ac.id

## **Abstract**

Various learning models in the era of society 5.0 must be supported by adequate facilities and infrastructure. School facilities and infrastructure are used to facilitate students' understanding of the material presented, by using appropriate educational facilities and infrastructure in teaching and learning activities to make them more effective and efficient. The Systematic Literature Review (SLR) method was chosen by the authors in this study, so that study materials related to the implementation of supervision of school facilities and infrastructure are in the form of books, articles and other sources that can be collected and conclusions drawn. . . This study resulted in the conclusion that, one aspect that is the main concern of educational supervision is related to educational facilities and infrastructure in schools. This research was conducted on the basis of the author's awareness of the importance of supervising school facilities and infrastructure in Era Society 5.0 in supporting learning activities so that they can run effectively and efficiently.

**Keywords:** Supervision; School Facilities and Infrastructure; Era of Society 5.0

## **Abstrak**

Berbagai model pembelajaran di era society 5.0 harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan, dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Metode Systematic Literature Review (SLR) dipilih oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana sekolah berupa buku, artikel dan sumber lainnya yang dapat terkumpul dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa, salah satu aspek yang menarik perhatian utama dari pengawasan pendidikan adalah terkait sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Penelitian ini dilakukan atas dasar, penulis menyadari tingkat urgensitas pengawasan sarana dan prasarana sekolah di Era Society 5.0 dalam menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Pengawasan; Sarana dan Prasarana Sekolah; Era Society 5.0

## **1. Pendahuluan**

Konsep pembelajaran di era society 5.0 sangat berkaitan dengan konsep dari kecakapan abad ke-21. Pembelajaran pada era tersebut lebih menitikberatkan pada skill atau kemampuan, inovasi dan penggunaan teknologi. Pendidik harus dapat memberikan lebih banyak ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas. Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai konsep tersebut antara lain, seperti *discoverey learning*, *project based learning*, *problem based learning*, dan *inquiry learning*. Dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis (Harun, 2021).

Berbagai model pembelajaran di era society 5.0 harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut dikarenakan, menurut Megasari (2020:637), sarana dan prasarana dalam dunia Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan, dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana dalam Pendidikan harus dikelola dengan baik, agar dapat menunjang keefektifan pembelajaran. Pengelolaan Sarana dan prasarana pendidikan harus ditangani dan dikelola secara maksimal sehingga fasilitas pendidikan bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pengajaran secara efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan kegiatan pengawasan. Pengawasan pada sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting, Seluruh kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan tanpa pengendalian dan pengawasan. Setiap kegiatan masing-masing akan dikendalikan dan diawasi setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kinerjanya satu sama lain (Afriansyah, 2019). Untuk mengetahui secara mendalam pentingnya pengawasan sarana dan prasarana sekolah, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "Pengawasan Sarana dan Prasarana Sekolah di Era Society 5.0".

### **Pengawasan**

Dalam bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata "awas", dengan begitu arti dari kata pengawasan sebagai kegiatan untuk mengawasi saja. Dalam organisasi, Pengawasan yaitu kegiatan untuk mengendalikan suatu pelaksanaan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi.

Menurut Henry Fayol, ia berpendapat bahwa definisi pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana tujuan yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah diberikan, ia bertujuan untuk menunjukkan atau menentukan berbagai kelemahan dan kesalahan dengan tujuan untuk memperbaikinya dan mengurangi terjadi lagi. (Irwan et al., 2021)

Dalam hal lain, Robert J. Mocker yang sebagaimana telah disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) berpendapat bahwa definisi pengawasan yang didalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: "Pengawasan manajemen ialah suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk dapat menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang sudah ada sebelumnya, merancang sistem informasi umpan balik, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, dan mengambil tindakan pengecekan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan". Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kepengawasan ialah merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan atau mengawasi dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan memberikan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya.

## Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting di sekolah untuk membantu menunjang proses pembelajaran. Kesuksesan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan bagaimana cara optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya (Fuad, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia pasal 1 Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar sarana prasarana menyatakan bahwa "Standar sarana prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi."

Semua fasilitas atau sarana dan prasarana yang berada di sekolah harus dapat dikelola dengan baik supaya keberadaan sarana dan prasarana tersebut dapat membantu kelancaran proses pembelajaran dan digunakan sesuai kebutuhan, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dalam pendidikan dapat terpenuhi. Dalam kegiatan pembelajaran sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran proses kegiatannya, sehingga pengelolaan dalam sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap instansi terutama sekolah (Darmastuti, 2014).

## Society 5.0

Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) yaitu penggunaannya berbasis teknologi (technology based) yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Istilah Masyarakat 5.0 (Society 5.0) pertama kali ada di Jepang pada tahun 2016. Istilah Society 5.0 saat itu semakin tersebar dan konsep dasarnya terus dibentuk. Masyarakat 5.0, pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kemajuan dalam teknologi dengan penyelesaian berbagai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya secara terintegrasi. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai memiliki potensi mendegradasi peran manusia dalam kehidupan. Masyarakat 5.0 (Society 5.0) atau yang sering disebut masyarakat cerdas, ialah masa depan baru bagi manusia dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi yang ada dalam ilmu dan teknologi mendapat tempat yang menonjol dengan tujuan untuk memecahkan masalah sosial. Masyarakat 5.0 tidak dapat dipisahkan dengan Revolusi Industri 4.0 (atau sering disebut Industri 4.0). Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 memberi tantangan besar bagi masyarakat luas, termasuk masyarakat Indonesia. Dalam dunia pendidikan pasti berhadapan dengan tantangan dan tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi, lulusan yang terampil dalam aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.

## 2. Metode

Penulis menyusun artikel ini dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana sekolah yang dapat berupa buku, artikel dan sumber lainnya. Setelah bahan kajian terkumpul, penulis kemudian mempelajari materi

tersebut dan kemudian penulis mencoba memberikan kesimpulan dari hasil analisis bahan kajian tersebut. Penelitian kepustakaan ini merupakan wujud dari penelitian akademik yang bertujuan mengembangkan aspek teoritis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Aktor dalam Pengawasan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah**

Salah satu aspek yang menarik perhatian utama dari pengawasan pendidikan adalah terkait sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Pengawas sekolah juga melakukan pemantauan dan penilaian hasil kinerja semua guru maupun penanggungjawab ruang atau kelas serta memberikan saran serta masukan. Mengelola kondisi sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi keberhasilan program pendidikan di sekolah (Khikmah, 2020). Pengelolaan sarana prasarana sangat penting dilakukan karena dengan adanya pengelolaan ini akan terpelihara dengan terstruktur sarana prasarana yang ada di lembaga pendidikan. Pada pengelolaannya aktor yang berperan penting adalah pihak sekolah terutama kepala sekolah harus bisa bertanggung jawab langsung terkait sarana dan prasarana tersebut. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap serta sumber daya manusia yang memadai, maka akan tercipta suatu sekolah yang sangat diidamkan oleh masyarakat dan dapat menunjang proses pembelajaran siswa (Rahayu & Utama, 2016).

#### **3.2 Proses Pengawasan Sarana dan Prasarana di Sekolah Era Society 5.0**

Pada lembaga pendidikan sekolah, suatu perencanaan dan menganalisis kebutuhan telah disiapkan oleh bagian perencanaan. Semua yang diperlukan sekolah akan dijadikan daftar usulan yang akan ditambahkan ke dalam daftar usulan kegiatan yang nantinya akan dikirimkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari aspek perencanaan, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan siswa dan guru guna mendukung proses belajar mengajar telah direncanakan dari jauh-jauh hari dan telah disetujui oleh kepala sekolah, wakil sarana prasarana, karyawan tata usaha yang mengatur sarana dan prasarana serta tenaga pendidik (Hartoni, 2018). Sejalan dengan Narudin dan Maryadi (2018) perencanaan sarana dan prasarana pendidikan juga menganalisis mengenai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana serta dapat meminimalisir penggunaan dana yang kurang tepat sasaran.

Pengadaan sarana prasarana pendidikan yang paling utama adalah penetapan yang dilakukan dengan seluruh pihak sekolah yang mengacu pada keperluan yang paling penting guna menunjang proses pembelajaran. Pengadaan sarana prasarana pendidikan bisa dilakukan dengan cara menyewa, menerima hibah dari pihak lain, reperasi barang-barang yang ada dan pembelian baru. Pengadaan sarana prasarana juga dilihat dari segi kualitasnya juga seperti dari kegunaan jangka waktu yang lama untuk alat peraga. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Gunawan dan Benty (2017) yang menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel yang artinya pengadaan barang tersebut harus mencapai sasaran baik fisik, pembiayaan, serta manfaat guna kelancaran pembelajaran. Dengan memfokuskan kualitas dari masing-masing sarana prasarana pendidikan akan memunculkan suatu hal yang dapat mendayagunakan secara maksimal dan efektif. Salah satu contoh kualitas yang wajib dalam keadaan baik ialah pada alat peraga pembelajaran, dengan kualitas yang baik maka siswa bisa menggunakan alat tersebut dengan maksimal. Setelah

pengadaan sarana prasarana pendidikan tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah penginventarisasi sarana prasarana pendidikan.

Kegiatan penginventarisasi meliputi kegiatan menerima barang, menyimpan barang dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang-barang tersebut. Untuk pengendalian sarana prasarana juga dapat dilakukan dengan memberikan kode barang, nama barang, sumber barang, volume atau jumlah barang, tanggal perolehan atau pembelian barang, mutase barang hingga keterangan barang. Pengawasan dilakukan dengan mengecek kembali buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat barang-barang yang telah diadakan. Pengawasan sarana prasarana menjadi tanggung jawab sekolah yang mana tidak semua barang yang berada di sekolah milik sekolah melainkan milik pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya pengawasan yang baik dalam bidang sarana dan prasarana maka akan meminimalisir resiko yang tidak diinginkan oleh pihak sekolah (Maryadi dan Nasrudin, 2018). Berdasarkan waktu pemeliharannya. Pemeliharaan bisa dilakukan secara harian atau berkala. Pemeliharaan harian dilakukan oleh setiap guru dan semua siswa, seperti membersihkan ruang kelas, menyimpan alat-alat pembelajaran setelah digunakan, dan perawatan buku-buku pelajaran. Sarana prasarana yang telah dikondisikan dengan baik akan mampu menunjang proses pembelajaran secara optimal. Sedangkan pemeliharaan secara berkala adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan guna meminimalisir pembelian barang baru yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Hal tersebut pemeliharaan berkala dapat dilakukan guna merawat prasarana sekolah agar dapat terkontrol dengan maksimal (Parid et al., 2020).

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan akan melewati prosedur penghapusan, seperti pemberian blangko penghapusan kepada setiap sekolah, kemudian sekolah akan mencatat barang-barang apa saja yang akan dihapus, setelah barang dicatat akan dilaporkan kepada dinas pendidikan maka peninjauan lapang dilakukan oleh BPK.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Sinta (2019) bahwa proses pengapusan dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan penghapusan sarana dan prasarana yang berlaku ialah kondisi sarana prasarana dalam keadaan sudah tua atau telah rusak berat sehingga tidak bisa dibenahi atau dimanfaatkan lagi, hal ini akan menjadi pemborosan bila mana perbaikan sarana dan prasarana akan menelan biaya yang terlalu besar. Dengan hal tersebut penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus melewati prosedur penghapusan yang sudah ditetapkan pemerintah kota dengan memperhatikan tahapan-tahapan penghapusan sarana prasarana yang bertujuan untuk menghemat pengeluaran dana dan pembebasan ruang pendidikan. Penghapusan juga mempunyai tujuan yang lain adalah untuk meringankan beban kerja tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah (Sinta, 2019).

### **3.3 Kendala Dalam Pengawasan Sarana dan Prasarana di Sekolah**

Pengawasan dalam sarana prasarana merupakan suatu kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk dapat menghindari dari bentuk penyimpangan, penyalahgunaan dan penggelapan. Dengan diberlakukan pengawasan dapat memberikan yang terbaik dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Dengan memiliki dasar seperti bukti-bukti yang ada, sehingga pengawasan sarana prasarana di sekolah bisa dilakukan dengan objektif. Namun jika hasil akhir dari pengawasan atau

pemeriksaan mendapatkan kekurangan-kekurangan, maka kepala sekolah memiliki peran wajib untuk melakukan berbagai tindakan untuk perbaikan dan penyelesaian permasalahan.

Namun dalam pengawasan sarana dan prasarana di sekolah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada kendala-kendala yang dapat menghambat proses dalam pengawasan tersebut. Tidak sedikit sekolah yang memiliki permasalahan atau kendala dalam sarana dan prasarana pendidikan yang dikarenakan kurang optimal dalam penggunaan dan perawatannya. Beberapa kendala yang terjadi yaitu pertama, kendala pengawasan terjadi pada sekolah yang terletak di daerah yang sulit terjangkau. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Hal itu dapat disimpulkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh aksesibilitas layanan sarana prasarana pendidikan yang belum merata, yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga pendidik didaerah-daerah tersebut, infrastruktur daerah yang kurang memadai, akses jalan raya, dan sarana transportasi yang masih sulit dijangkau dan susah terpenuhi. Cara yang dapat dilakukan yaitu pemerintah secara merata lebih memperhatikan Pendidikan di daerah sulit terjangkau. Pemerintah harus memberikan akses yang mudah menuju sekolah dalam melakukan pengawasan.

Kedua, Dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas dapat mempengaruhi kurangnya tenaga pendidik. Hal ini dapat menimbulkan sulitnya akses untuk membangun kreatifitas dari tenaga pendidik terlebih pada era society 5.0 karena masyarakat dituntut untuk canggih dalam teknologi informasi. Sumber daya manusia yang masih terbelang tertinggal dan tidak mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi mengenai sarana prasanana yang dapat membantu pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Hal tersebut menyebabkan pengaturan sarana dan prasarana masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur sehingga sering menyebabkan sarana prasarana rusak atau tidak dijaga secara baik. Menurut Victoria (2005) pada judul penelitiannya: "Professional Learning in Effective Schools" diperoleh gambaran bahwa pembelajaran profesional di sekolah yang efektif memerlukan dukungan sarana prasarana (alat) yang memadai. Maka yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi. Masyarakat dituntut untuk bisa berdampingan dengan teknologi dan memanfaatkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini pemerintah juga berhak andil dalam peningkatan kualitas mutu sumber daya pendidikan yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar dan tes keahlian terutama bagi daerah dengan SDM yang masih rendah.

Ketiga, Kurangnya penyebaran sarana dan prasarana yang tidak merata. Dikemukakan lebih lanjut bahwa sarana prasarana sebagai suatu sistem yang dapat memperbaiki pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik. Sehingga jika sarana prasarana tidak dapat menyebar luas dan adil di sekolah-sekolah daerah, maka dapat mengakibatkan kurangnya potensi pada peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Sangat diperlukannya sarana dan prasarana di sekolah untuk meningkatkan kualitas peserta didik dan juga tenaga pendidik. Dengan permasalahan tersebut maka pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mendata sarana dan prasarana yang menyebar. Sehingga dengan data digital tersebut, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat diketahui keberadaannya. Selain itu pihak sekolah dapat mengadakan hal tersebut berbasis media internet tanpa harus datang mengadu ditempat.

Keempat, Pada Era Society permasalahan terjadi juga terletak pada akses internet yang kurang tersebar rata di daerah daerah. Banyak daerah yang tidak dapat mengakses internet sehingga pengawasan juga terhambat dan informasi dari pemerintahan pusat sangat sulit untuk diterima oleh daerah karena keterbatasan akses internet tersebut. Terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar dan tertinggal (daerah 3T). Pada Pasal 1 Perpres nomor 63 Tahun 2020 dijelaskan bahwa "Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional". Dalam hal ini seharusnya penyebaran media internet harus merata karena media internet merupakan penghubung atau komunikasi secara tidak langsung antar daerah. Dengan akses internet, maka suatu daerah dapat terhubung dengan daerah lain. Sehingga dalam hal ini seharusnya pengawasan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan memanfaatkan media internet agar tetap terpantau keberadaannya.

#### 4. Simpulan

Pengelolaan sarana prasarana sangat penting dilakukan karena dengan adanya pengelolaan ini akan terpelihara dengan terstruktur sarana prasarana yang ada di lembaga pendidikan. Pada pengelolannya aktor yang berperan penting adalah pihak sekolah terutama kepala sekolah harus bisa bertanggung jawab langsung terkait sarana dan prasarana tersebut. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan juga menganalisis mengenai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana serta dapat meminimalisir penggunaan dana yang kurang tepat sasaran. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel yang artinya pengadaan barang tersebut harus mencapai sasaran baik fisik, pembiayaan, serta manfaat guna kelancaran pembelajaran. Dengan memfokuskan kualitas dari masing-masing sarana prasarana pendidikan akan memunculkan suatu hal yang dapat mendayagunakan secara maksimal dan efektif. Kegiatan penginventarisasi meliputi kegiatan menerima barang, menyimpan barang dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang-barang tersebut. Pemeliharaan bisa dilakukan secara harian atau berkala. Sehingga sarana prasarana yang telah dikondisikan dengan baik akan mampu menunjang proses pembelajaran secara optimal. proses pengapusan dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan penghapusan sarana dan prasarana yang berlaku ialah kondisi sarana prasarana dalam keadaan sudah tua atau telah rusak berat sehingga tidak bisa dibenahi atau dimanfaatkan lagi, hal ini akan menjadi pemborosan bila mana perbaikan sarana dan prasarana akan menelan biaya yang terlalu besar. Kendala pengawasan terjadi pada sekolah yang terletak di daerah yang sulit terjangkau. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. Cara yang dapat dilakukan yaitu pemerintah secara merata lebih memperhatikan Pendidikan di daerah sulit terjangkau. Pemerintah harus memberikan akses yang mudah menuju sekolah dalam melakukan pengawasan.

#### Daftar Rujukan

- Afriansyah, H. (2019). 6. Administrasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan.
- Aristo, T. J. V. (2019). Analisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(1), Hlm 26.
- Benty, D.D.N., & Gunawan, I. 2017. *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Hartoni, H. (2018). Impelementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1), 178. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3088>
- Harun, S., 2021. *Pembelajaran Di Era 5.0*

- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3, 123-130. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p123>
- Maryadi dan Nasrudin. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Pembelajaran Di Sd. *Jurnal Managemen Pendidikan*, 13(2), 15-23. <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363>
- Megasari, R., 2020. Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Smpn 5 Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 2, 636-648
- Ni'amissa'adah, A. L. F. I., Sya'adah, E. N., & Thobroni, A. Y. (2022). Urgensi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nahl 68-69. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(2), 219-221.
- Parid, M., Laili, A., & Alif, S. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i2.3755>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Rahayu, S. M., & Utama, S. (2016). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Varidika*, 27(2), 123-129. <https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724>
- Sinta, I. M. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Islamic Education Manajemen*, 4(1), 77-92. <https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5645>
- Setyaningih, S. (2019). Pengelolaan sarana prasarana dalam implementasi kurikulum pendidikan guru sekolah dasar: Sebuah studi kasus di Universitas Negeri Semarang. *Manajemen Pendidikan*, 13(2), Hlm 67.
- Ulfiaturrohmah, N., & Diantoro, F. (2021). peran tri pusat pendidikan dalam menghadapi problematika pembelajaran daring di daerah 3t. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(2), Hlm 125.